

Perkembangan Pendidikan Indonesia pada Zaman Penjajahan II (Abad 20 Termasuk Masa Pendudukan Jepang)

*The Development of Indonesian Education in the Second Colonial Period
(20th Century Including the Japanese Occupation Period)*

Danna Aditya Rahma Fuadi¹, Devgano Risydan Al Anshori²

¹² STAI Pati, Indonesia

* Correspondence e-mail; dananshor@gmail.com

Article history

Submitted: 2023/05/23; Revised: 2023/06/18; Accepted: 2023/07/26

Abstract

The colonization that occurred in Indonesia during the 20th century, both by European countries and Japan, brought significant changes in the development of education in Indonesia. Prior to the Japanese occupation, the education system in Indonesia was dominated by the Dutch education system which was elitist and limited. This study aims to examine the development of Indonesian education during the period of the second colonization, especially during the Japanese occupation. Through a historical approach and document analysis, this study discusses important changes in the education system that occurred during that period. This study also discusses the positive and negative impacts of these changes. The results of the study show that during the Japanese occupation, education in Indonesia underwent significant development, such as the opening of educational opportunities for all without exception and the introduction of new ideas in the education system, such as vocational education. However, the development of education in Indonesia during that time also had a negative side, such as education being directed to support Japan's interests and discriminating against local languages. This study provides an important contribution to understanding the history of education development in Indonesia, especially during the period of the second colonization. The results of this study can also provide guidance for future education development.

Keywords

education; second colonization; japanese occupation; history of education; education system



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi negara-negara Barat, Indonesia juga mempunyai komoditas yang melimpah ruah, berbagai macam rempah-rempahan dan hasil bumi dapat ditemukan di Nusantara dengan mudah. Hal itu membuat negara-negara barat mendatangi Nusantara, kapal-kapal dagang dari berbagai negara berdatangan, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda. (Harkantiningasih, 2013)

Perdagangan yang awalnya dikuasai oleh raja-raja maupun bangsawan Nusantara pada saat itu, pada awal Abad ke-16 perairan Nusantara yang didominasi oleh kapal-kapal asing, membuat persaingan dagang tidak sehat. Tujuan awal kedatangan para koloni-koloni asing untuk berdagang berubah menjadi kolonialisme. (Harkantiningasih, 2014)

Para koloni-koloni asing menciptakan sekian aturan, sampai kekuasaan Nusantara bisa diatur oleh kolonial, hal ini mempengaruhi banyak sektor, sistem politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan Nusantara. (Hasnida, 2017) Pada abad ke-20, Indonesia mengalami periode panjang penjajahan oleh negara-negara Eropa dan Jepang. Selama masa penjajahan ini, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan. Pada masa penjajahan II, yaitu periode penjajahan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun dalam waktu yang relatif singkat.

Sebelum penjajahan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia didominasi oleh sistem pendidikan Belanda yang bersifat elit dan terbatas. Pendidikan hanya tersedia bagi kalangan tertentu dan tujuannya adalah untuk melahirkan pegawai-pegawai pemerintah yang setia pada pemerintah kolonial Belanda. Namun, pada masa penjajahan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan dibukanya kesempatan pendidikan bagi semua orang tanpa terkecuali.

Selain itu, penjajahan Jepang juga memperkenalkan gagasan-gagasan baru dalam sistem pendidikan, seperti pendidikan kejuruan yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan mandiri. Pendidikan kejuruan ini menjadi landasan bagi kemajuan industri di Indonesia pada masa kemerdekaan.

Namun demikian, perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang juga memiliki sisi negatif. Pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan Jepang dan menekan identitas nasional Indonesia. Selain itu, pendidikan di bawah kekuasaan Jepang juga banyak menggunakan bahasa Jepang dan mendiskriminasi bahasa-bahasa lokal.

Oleh karena itu, penelitian tentang perkembangan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan II, terutama pada masa pendudukan Jepang, masih sangat relevan untuk dikaji. Dengan memahami sejarah perkembangan pendidikan Indonesia pada masa itu, dapat memberikan wawasan dan arahan bagi pembangunan pendidikan di masa depan.

Pada penelitian ini, akan dijelaskan Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Zaman Penjajahan II (Abad 20 Termasuk Masa Pendudukan Jepang). Tentu batasan negara koloni dalam hal ini dapat kita telaah, yaitu Belanda dan Jepang, mengingat kedua negara merupakan koloni asing yang cukup mempengaruhi sekian aspek kehidupan Nusantara. Penelitian ini menyampaikan beberapa rumusan masalah, diantaranya. Bagaimana Hakekat Politik Etis Dalam Sejarah Pendidikan Indonesia Pada Awal Abad Ke-20? Bagaimana Sistem Pendidikan Kolonial Di Indonesia Sebelum Masuknya Jepang? Bagaimana Berkembangnya Pendidikan Yang Bersifat Nasional Indonesia Di Awal Abad Ke-20? Bagaimana Karakter dan Sistem Persekolahan Di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang?.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini ialah metode sejarah. Metode sejarah adalah suatu usaha atau cara untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta serta menyusun simpulan tentang sebuah peristiwa penting pada masa lalu. Tujuan dari metode penelitian sejarah ialah membuat rekonstruksi masa lalu secara tersistematis dan objektif.(Wulan Juliani Sukmana, 2021) Tahapan penelitian dalam metode sejarah sendiri terbagi menjadi empat tahapan kerja. Tahap pertama ialah heuristik. Heuristik adalah tahapan awal yang dilakukan ketika sudah menentukan topik penelitian. Heuristik sendiri ialah proses mencari, menemukan, dan menghimpun sumber-sumber sejarah yang terkait dengan pokok permasalahan. Heuristik dengan proses pencarian sumber fokus kepada sumber tertulis (studi literatur), sumber benda, dan lisan. Sumber tertulis berupa arsip, sumber resmi tercetak, dokumen, buku dan lain-lain dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penulisan jurnal ilmiah ini. Sumber tertulis berupa arsip dan sumber resmi tidak tercetak, serta dokumen ditelusuri di search engine perangkat elektronik. Pencarian sumber primer dan sumber yang sezaman yang berbentuk sumber resmi tercetak, dan buku dilakukan di Perpustakaan STAI Pati.

Di Perpustakaan STAI Pati dikhususkan kepada pencarian sumber primer, sekunder, dan buku-buku yang mendukung penelitian jurnal ilmiah tentang Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Zaman Penjajahan II (Abad 20 Termasuk

Masa Pendudukan Jepang). Setelah Heuristik tahapan dalam metode penelitian sejarah adalah kritik sumber. Kritik Sumber dalam metode sejarah terbagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menentukan otentisitas sumber dengan cara memberikan penilaian kepada kondisi fisik sumber tersebut, seperti kertas, tinta, huruf, watermark, stempel dan sebagainya. Kritik intern dilakukan dengan menilai sumber dan membandingkan data yang ada, artinya data yang berada di dalam sumber tersebut dibandingkan dengan sumber lainnya.

Tahap ketiga dalam metode penelitian historis yang akan digunakan dalam penelitian jurnal ilmiah ini adalah interpretasi. Interpretasi adalah proses menafsirkan berbagai fakta menjadi sebuah rangkaian yang logis. Pada tataran oprasionalnya langkah interpretasi ini dilakukan secara sistematis dan analitis dengan mengurai fakta dan dilakukan secara sintesis yakni menghimpun fakta. Pemahaman secara verbal tidak memadai untuk menginterpretasikan informasi yang terkandung di dalam sumber sejarah. Fakta yang diperoleh diinterpretasikan baik secara verbal, teknis, logis, faktual dan psikologis. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan dapat dipahami secara menyeluruh dan mendalam.

Tahap selanjutnya adalah tahapan terakhir dalam penulisan sejarah menggunakan metode historis, Historiografi. Historiografi merupakan tahapan penulisan sejarah. Fakta yang telah diinterpretasikan kemudian dituliskan dalam penulisan yang sistematis dan kronologis. Historiografi yang akan dihasilkan dibagi menjadi beberapa pembahasan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan menggunakan metode sejarah, panduan bagaimana teknis penelitian jurnal ilmiah ini dapat dikerjakan secara efektif dan akurat. Efektif dalam pengertian tahapan demi tahapan dikerjakan dengan terperinci. Akurat dalam pengertian hanya sumber yang telah menjadi fakta sejarah yang dapat dijadikan bahan penulisan jurnal ilmiah ini. Selain itu, unsur diakronis yang menunjukan sejarah, sebagai ilmu tentang berfikir dalam waktu sangat diperhatikan.

Pada penulisan jurnal ilmiah ini teori atau pendekatan secara teoritis untuk membangun sebuah narasi sejarah dalam eksplanasi dijelaskan tidak secara terperinci. Pendekatan dalam penelitian jurnal ilmiah ini menggunakan konsep-konsep Pendidikan yang digunakan sebagai pendekatan untuk penelitian Perkembangan Pendidikan Indonesia Pada Zaman Penjajahan II (Abad 20 Termasuk Masa Pendudukan Jepang).

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

TEMUAN

Pemberlakuan Politik Etis

Adalah Van Deventer yang pertama kali menyampaikan rancangan tentang “hutang budi negeri Belanda kepada rakyat Bumiputera”. Di depan parlemen Belanda dia mengajukan cara untuk membalas jasa kepada bangsa Indonesia yang banyak mengeluarkan tenaga demi bangsa Belanda. Van Deventer menegaskan bahwa negeri Belanda berhutang budi kepada bangsa Indonesia dan hutang budi itu harus dibayar. Gagasan tersebut menjadi penyebab lahirnya politik etis yang juga disebut sebagai politik balas budi dengan tujuan utama yaitu untuk mengangkat taraf kehidupan rakyat bumiputera di Hindia Belanda (Syarif, 2019).

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (eerschuld) kepada bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina kemudian memasukkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam tiga program utama, yaitu : 1. Irigasi, yaitu program untuk memperbaiki pengairan pada lahan-lahan pertanian rakyat bumiputera dengan membangun bendungan dan jalur-jalur pengairan, 2. Imigrasi, yaitu program untuk pemerataan penduduk dari pulau Jawa yang padat menuju daerah-daerah luar Jawa yang masih jarang penduduknya, 3. Edukasi yakni program untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat bumiputera dengan pemerataan peluang belajar dan pendirian sekolah-sekolah rakyat. (Syarif, 2019)

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi bukan untuk mengairi lahan-lahan persawahan milik rakyat, melainkan untuk perkebunan-perkebunan Belanda sendiri. Sedangkan politik imigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk Bumi putera ke daerah perkebunan untuk dijadikan pekerja rodi melalui sistem tanam paksa (cultuur stelsel) yang berada diluar Jawa. Hanya program pendidikan yang memiliki manfaat penting bagi rakyat bumiputera kendatipun dalam pelaksanaannya, politik pendidikan ini diiringi dengan sejumlah kebijakan non populis yang menyebabkan reaksi keras dari kalangan pendidikan Islam (Syarif, 2019).

Pada aspek politik etis di bidang edukasi itu Belanda telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dan intelektual rakyat bumiputera. Pengaruhnya begitu besar dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan

dan pengajaran di Hindia Belanda. Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun untuk rakyat biasa yang hampir menyeluruh di daerah-daerah di Jawa. Dalam hal ini, keuntungan yang dirasakan oleh bangsa bumiputera adalah mereka mendapatkan peluang yang lebih besar untuk bersekolah. Telah tercatat sampai pada tahun 1940 anak-anak bumiputera yang bersekolah di sekolah-sekolah rendah yang berbahasa daerah telah berjumlah 2 juta lebih dan disekolah-sekolah Belanda tercatat sebanyak 88 ribu lebih. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat yang selama ini hanya cenderung mengandalkan pendidikan tradisional seperti pesantren untuk beralih pada pendidikan yang lebih modern yang ditawarkan oleh pemerintah penjajahnya. Pada saatnya nanti kecenderungan untuk menikmati pendidikan ala Barat di sekolah Belanda itu telah membawa kemajuan bagi bangsa bumiputera terutama terkait dengan lahirnya kelas intelektual baru yang memiliki cara berpikir yang lebih modern tetapi dengan semangat nasionalisme yang tertanam kuat.(Syarif, 2019)

Di sisi lain, pelaksanaan politik etis juga telah menimbulkan reaksi antagonik terhadap keberadaan pendidikan tradisional nusantara. Pelaksanaan politik etis telah menimbulkan banyak reaksi keras terutama dari kalangan pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan pelaksanaan politik etis juga dibarengi dengan berbagai kebijakan yang kurang populis bagi keberadaan pendidikan Islam. Muatan kebijakan-kebijakan itu dinilai lebih banyak berpihak kepada kepentingan pemerintah kolonial daripada kepentingan rakyat bumiputera (Syarif, 2019).

Dalam pelaksanaanya, politik etis telah menumbuhkan banyak tanggapan yang menunjukkan berbagai penyimpangan dari tujuannya semula bahkan ketika pertama kali diranacang. Bahkan menurut Elsbels Locher Shocltten, Politik Etis telah berubah menjadi “kebijakan yang bertujuan memperluas kekuasaan Belanda di seluruh wilayah Hindia Belanda menuju pemerintahan sendiri dibawah belanda menurut model Barat”(Syarif, 2019).

Keinginan untuk membentuk model masyarakat barat melalui kebijakan pendidikan bagi rakyat bumiputera itulah yang, membuat Belanda menerapkan kebijakan yang dualistis dalam kerangka politik etisnya dengan cara membedakan perlakuan antara lembaga pendidikan yang didirikan oleh Belanda dengan lembaga pendidikan yang didirikan khas nusantara seperti pesantren.

Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda

Ketika program pendidikan dalam kerangka politik etis dilaksanakan, pemerintah kolonial Hindia-Belanda sempat memikirkan baik-baik untuk

memanfaatkan tradisi pendidikan rakyat yang sudah ada sebagai dasar dalam pengembangan pendidikan mereka dalam kerangka politik etisnya. Akan tetapi, gagasan ini secara teknis sulit dipenuhi karena tradisi pendidikan Islam waktu itu dipandang memiliki dasar ideologi Islam yang berbeda dari apa yang selama ini dibawa oleh Belanda sendiri bersama misi imperialismenya, yaitu misi Kristenisasi. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah Hindia Belanda, karena menyangkut masalah ajaran Islam yang memang menjadi dasar pijakan pendidikan Islam; dan mustahil untuk dihilangkan dari kurikulumnya.

Dalam konteks ini, Islam dengan lembaga pendidikannya, dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi pemerintah Hindia Belanda. Ancaman ini lebih-lebih ditujukan kepada kebijakan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) dan keberlanjutan penjajahan mereka di Hindia Belanda sendiri. Snouck Hurgonje bersama dengan politik asosiasinya meyakini pendidikan Barat akan melunturkan pengaruh Islam. Menurut Snouck Hurgonje, pendidikan Barat merupakan cara yang ampuh untuk mengurangi dan mengalahkan pengaruh Islam di Indonesia.

Hal lain yang mencegah Belanda untuk mengakomodir lembaga pendidikan Islam adalah, disamping cita-cita untuk mensejahterakan rakyat pribumi, pemerintah Hindia-Belanda juga mempunyai misi lain untuk menyebarkan Kristen di Hindia-Belanda melalui politik etis. Berbagai subsidi untuk sekolah dan lembaga sebagai kepentingan menyebarkan misi tersebut diberikan secara besar-besaran.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda memilih bentuk pembelajaran di sekolah yang dikelolanya sendiri, dan berbeda dibandingkan dengan lembaga pendidikan pribumi (khususnya pesantren) baik secara administrasi, manajemen, maupun sistemnya. Sekolah ala Belanda itu berbentuk sekolah modern dengan sistem klasikal yang dapat kita lihat sampai sekarang. Tetapi berbeda dengan sekolah Belanda sebelumnya, sekolah Belanda di era Politik Etis didirikan lebih meluas dan diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat sesuai dengan gagasan awalnya untuk membalas budi terhadap rakyat bumiputera.

Dengan demikian, jika pada masa awal penjajahan Belanda, sekolah merupakan pendidikan yang eksklusif, maka pada awal abad ke-20 atas perintah Gubernur Djenderal Van Heutsz, pendidikan mulai diselenggarakan bagi masyarakat luas dalam bentuk sekolah-sekolah desa. Pada masa inilah, rakyat bumiputera yang sebelumnya hanya memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah tradisional, mulai mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah pemerintah dan sebagai konsekuensinya didirikanlah sekolah di banyak tempat.

Menurut Maksud, Sekolah Desa atau Sekolah Rakyat, tidak hanya menawarkan anggaran studi yang murah dan mata pelajaran yang praktis, tetapi juga menjanjikan pekerjaan meskipun hanya sebagai tenaga administrasi rendahan.

Tetapi kebijakan pendirian sekolah modern ala Belanda tersebut alih-alih tanpa tanggapan negatif dalam pandangan para tokoh pendidikan Islam. Dalam hal ini, Belanda dinilai lebih berpihak kepada sekolah-sekolah yang didirikannya daripada lembaga pendidikan tradisional yang lebih dulu ada di nusantara. Seperti yang ditegaskan diatas, lulusan sekolah Belanda lebih dijamin untuk mendapat pekerjaan di kantor-kantor Belanda daripada mereka yang mendapat pendidikan dari lembaga pendidikan Islam semacam pesantren. Ditambah lagi dengan sikap diskriminatif terhadap dualisme pendidikan ini bukanlah satu-satunya kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang dirasa merugikan.

Untuk memudahkan tujuannya, pemerintah Hindia Belanda tidak hanya menerapkan kebijakan standar ganda dengan lebih mengutamakan sekolah umum miliknya daripada pendidikan pribumi. Pada 1905, Pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan Ordonansi Guru (*Goeroe Ordonantie*) dalam Stadsblaad 1905 No. 550 yang berisi kewajiban bagi setiap penyelenggara pendidikan Islam agar memperoleh izin tertulis dari bupati atau pejabat yang setara kedudukannya. Setiap guru juga diwajibkan membuat daftar murid-murid lengkap dengan segala keterangan yang harus dikirimkan secara periodik kepada pejabat yang bersangkutan.

Sejarah dari lahirnya kebijakan ordonansi guru tersebut bersumber dari peristiwa pemberontakan petani di Banten pada 1888. Pada 1890, K.F Holle menyarankan agar pendidikan agama Islam diawasi dengan ketat karena pemberontakan para petani Banten tersebut disangka telah dimotori oleh para haji dan guru agama. Kemudian setelahnya, terjadilah perburuan terhadap para guru agama di Jawa. Dan demi penyeragaman dalam pengawasan guru tersebut, K.F Holle menyarankan agar para bupati melaporkan daftar guru didaerahnya setiap tahun. Kemudian, pada tahun 1904, seiring dengan berjalannya politik etis, Snouck Hurgronje menyarankan agar pengawasan tersebut meliputi izin khusus dari bupati, daftar guru dan murid, dan bahwa pengawasan itu dilakukan oleh bupati dengan membentuk suatu panitia. Setahun kemudian lahirlah ordonansi guru 1905.

Esensi Ordonansi Guru ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pengawasan Belanda terhadap pembelajaran agama Islam di tanah Jawa dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Substansi dari Staatsblad nomor 550 tahun 1905 tersebut terdiri dari enam pasal, dan ringkasan terjemahannya adalah sebagai berikut: (Pasal

1) Guru-guru agama dengan reputasi baik dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang akan mengajarkan agama Islam wajib mendapat izin tertulis dari Patih atau Bupati. (Pasal 2) Guru-guru agama wajib mendaftarkan para muridnya secara tertulis sesuai dengan ketentuan (blanko) pendaftaran yang telah ditetapkan Bupati; Murid-murid yang berasal dari luar daerah atau tempat tinggal guru agama, ditetapkan Bupati dengan menyerahkan identitas yang bersangkutan. (Pasal 3) Pengawasan guru agama dalam mengajar agama dilakukan oleh Patih atau Bupati; Kepada Patih dan Bupati, guru agama wajib memberi daftar mata pelajaran yang akan diajarkan, dan memberi izin masuk keduanya (Patih dan Bupati) ke semua tempat pengajaran dan tempat tinggal murid; (Pasal 4) Guru-guru agama yang mengajar tanpa izin atau lalai dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dikenakan denda setinggi-tingginya 25 gulden, atau sanksi kurungan maksimal 7 hari dengan kewajiban bekerja untuk negara tanpa upah; Bagi guru agama yang mengajarkan materi pelajaran yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, atau menggunakan nama palsu dalam menerima murid, dikenakan denda setinggi-tingginya 100 gulden, atau sanksi kurungan maksimal 30 hari dengan kerja paksa tanpa upah. (Pasal 5) Guru-guru agama harus tunduk pada peraturan ini. (Pasal 6) Peraturan ini berlaku di Jawa dan Madura, kecuali pada daerah yang dikuasai Sultan, yakni Yogyakarta dan Surakarta. (Pasal 6) Peraturan ini berlaku di Jawa dan Madura, kecuali pada daerah yang dikuasai Sultan, yakni Yogyakarta dan Surakarta.

Berhubung dengan Ordonansi Guru itu, Deliar Noer menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya. Dia menyatakan sebagai berikut: Salah satu cara yang dipergunakan oleh pihak Belanda untuk mengawasi Islam di Indonesia, terutama di Jawa, ialah peraturan yang dikeluarkan dalam tahun 1905 tentang pendidikan Islam. Peraturan tersebut mengharuskan izin tertulis dari bupati atau pejabat yang sama kedudukannya tentang pendidikan agama Islam. Izin ini mengemukakan secara terperinci sifat dari pendidikan itu. Tambahan lagi guru agama bersangkutan harus membuat daftar dari murid-muridnya menurut bentuk tertentu yang harus dikirimkan secara periodik kepada kepala daerah bersangkutan. Bupati atau pejabat yang sama kedudukannya hendaklah mengawasi dan mengecek apakah guru agama tersebut bertindak sesuai dengan izin yang diberikan. Pejabat ini juga harus mengawasi anak-anak murid dimaksud yang berasal dari luar daerah guru tadi.

Ordonansi Guru 1905 dinilai oleh umat Islam sebagai bentuk sikap diskriminatif pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan pribumi. Peraturan ini memang mudah dijalankan oleh sekolah yang memiliki organisasi yang rapi,

tetapi tidak demikian halnya dengan guru-guru agama Islam. Mereka tidak menyelenggarakan administrasi yang rapi dalam mengatur sekolah/pengajian. Bahkan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren tidak menyelenggarakan administrasi seperti itu, tidak mencatat nama seluruh santri atau guru-guru yang mengajar di sana.

Kemunculan kebijakan itu menjadikan keadaan penyelenggaraan pendidikan Islam pada akhir abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20 dikontrol secara ketat. Mengapa demikian? Sebab, pemerintah kolonial Belanda saat itu membaca bahwa membiarkan penyelenggaraan pendidikan Islam tanpa kontrol dapat menjadi ancaman bagi eksistensi mereka di tanah jajahan. Karena itulah, Ordonansi Guru diciptakan untuk mengontrol lembaga pendidikan Islam yang dipandang pemerintah Belanda telah berperan sebagai sebuah ancaman potensial terhadap rezim mereka.

Lembaga pendidikan Islam yang menjadi sasaran Ordonansi Guru dan dianggap mengancam keberadaan pemerintah kolonial Belanda adalah pesantren yang dipimpin oleh seorang Kiyai. Bagi Belanda, pesantren adalah sumber dari semua bentuk perlawanan masyarakat di Jawa. Perlu diakui bahwa pesantren pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 memang telah memainkan peran yang sangat penting bagi perlawanan masyarakat terhadap pemerintah Belanda. Di pesantren bibit-bibit anti kolonialisme ditebar dan dipelihara dengan baik.

Para santri di pesantren dan masyarakat umum di didik agar memiliki sikap fanatisme yang tinggi, sehingga Belanda dianggap sebagai pemerintah kafir yang telah menjajah agama dan bangsa. Karena itulah, Sartono Kartodirdjo menegaskan bahwa perkembangan pesantren yang sangat luar biasa telah berfungsi dengan sangat baik sebagai tempat pendidikan serta gerakan kebangkitan Islam yang militan.

Anehnya, kendatipun terasa terlalu menekan pendidikan Islam, reaksi-reaksi keras terhadap Ordonansi Guru 1905 relatif tak terlihat. Umat Islam saat itu seperti membiarkan pemberlakuan kebijakan yang membelenggu guru agama itu. Atas fenomena ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan sikap diam umat Islam yang melingkari pemberlakuan peraturan tersebut saat itu.

Dua puluh tahun setelahnya, kebijakan itu disusul dengan kebijakan Ordonansi Guru kedua yang diterbitkan pada 1925. Berbeda dengan yang pertama, ordonansi guru 1925 ini hanya mengharuskan para guru agama untuk melaporkan diri. Kendati begitu, sesungguhnya dua kebijakan itu memiliki fungsi dan tujuan yang

sama, yaitu dijadikan media oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi dan mengontrol sepak terjang para pengajar-pengajar agama Islam.

Berbeda dengan pemberlakuan ordonansi guru yang pertama, Ordinansi Guru yang kedua ini menimbulkan banyak protes. Banyak reaksi yang diselenggarakan oleh kalangan pribumi terhadap ordonansi tersebut. Kongres Al Islam 1926 (1-5 Desember) di Bogor menolak cara pengawasan terhadap pendidikan agama ini. Kewajiban melapor kepada pemerintah Belanda itu oleh guru-guru agama Islam dinilai memberatkan karena lembaga pendidikan Islam pada umumnya tidak memiliki administrasi dan sarana yang memadai.

Reaksi keras atas ordonansi tersebut bukan hanya datang dari penduduk bumiputera, tetapi juga dari pihak Belanda sendiri. Ch. O Van Der Plas pada 1934 berpendapat bahwa ordonansi tersebut tiada gunanya. Dia memandang bahwa demi penyederhanaan dan efisiensi, hendaknya pemerintah Hindia Belanda menghapuskan ordonansi guru yang dinilainya hanya menghabiskan kertas ini. Pada akhirnya, ordonansi guru kehilangan urgensinya dan terpaksa menghilang dari peredaran.

Selain ordonansi guru, pemerintah kolonial juga menciptakan ordonansi lain yang bertujuan untuk mengawasi tumbuhnya sekolah-sekolah swasta di Hindia Belanda. (Toezicht Ordonnantie Particulier Onderwijs) lewat Stadsblaad 1932 No. 494 yang lebih terkenal dengan ordonansi sekolah liar (Wilde Scholen Ordonnantie). Ordonansi tersebut diterbitkan pada 1932. Disamping mengawasi pertumbuhan sekolah-sekolah swasta, peraturan itu juga menetapkan bahwa para guru yang akan mengajar di sekolah swasta yang bersubsidi maka harus meminta izin kepada karyawan distrik setempat. Pelamar yang ingin mengajar di sekolah swasta harus alumni dari sekolah pemerintah atau sekolah swasta bersubsidi dan tidak akan mengganggu ketenangan dan ketertiban pemerintah kolonial. Ordonansi ini juga ditujukan untuk mencegah pengaruh politik pada sekolah-sekolah swasta yang disebut "sekolah liar" tersebut. Selain itu, ordonansi tersebut juga memberikan kekuasaan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk membubarkan dan menutup madrasah/pesantren dan sekolah yang dianggap tidak memiliki izin penyelenggaraan, termasuk menutup sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak sejalan dengan kepentingan kolonial Belanda.

Kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia-Belanda sepanjang periode politik etis terlihat terlalu berkecenderungan untuk menghambat laju pertumbuhan dan perkembangan pendidikan agama Islam di Nusantara.

Banyaknya kalangan bumiputera yang masuk ke sekolah-sekolah Belanda telah menghasilkan kelas intelektual baru yang dasar pendidikannya mengarah ke Barat dan terpisah dari kalangan pribumi berpendidikan tradisional yang lahir dari pesantren. Bahkan secara politik, pemerintah Hindia-Belanda memiliki peran dalam mengembangkan pendidikan untuk kaum bumiputera, terutama setelah diterapkannya kebijakan politik etis (*ethische politiek*), dan tidak hanya memecah umat Islam, tetapi juga menyingkirkan lembaga pendidikan pesantren yang menolak subsidi dari pemerintah ke daerah pedalaman, sehingga pesantren tertutup dari perkembangan pendidikan modern.

Karena alasan politik pula, pemerintah kolonial Belanda memisahkan pendidikan Islam dari sistem pendidikan umum yang dikembangkan oleh mereka. Pemisahan sistem tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang disangkai anti-Islam. Di sisi lain, pemerintah kolonial Belanda melalui pembangunan sekolah-sekolahnya juga menjalankan politik asosiasi sebagaimana dianjurkan oleh Snouck Hurgonje, antara lain melalui pelajaran sejarah Hindia-Belanda dengan tujuan agar supremasi Belanda atas bangsa pribumi tergambarkan. Pelajaran sejarah bangsa asing seperti ini jelas bukan materi yang diinginkan dalam kerangka pendidikan rakyat bumiputera, apalagi bagi pesantren.

Selain praktek pemisahan pendidikan Islam dengan pendidikan umum itu, di lain pihak pemerintah kolonial Belanda juga masih setengah hati dalam menjalankan misi politik etisnya. Gagasan pemerataan pendidikan untuk rakyat bumiputera tidak sepenuhnya dijalankan berdasarkan cita-cita yang luhur untuk membalas budi secara merata tanpa pandang bulu. Pada kenyataannya, pendidikan yang bagus tetap terbatas pada golongan atas. Untuk rakyat banyak pendidikan dikendalikan agar sedapat mungkin tetap rendah dan sederhana, hampir tanpa jalan keluar ke pendidikan lanjutan untuk mendapat kedudukan yang lebih baik. (Syarif, 2019)

Dampak Kebijakan Kolonialisme Dalam Pendidikan

Pendidikan Islam Indonesia, sebelum penjajah masuk merupakan pendidikan yang kuat dengan segenap prinsip kultural. Akibat dari kedatangan penjajah, adanya dikotomi pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Fragmentasi tersebut merupakan asal mulanya dikotomisasi ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Walaupun dengan berbagai macam usaha reprensif dan dekonstruktif penjajah, pendidikan Islam tradisional Indonesia masih lestari dan dapat bertahan sampai sekarang (Iskandar & Ansori, 2022).

Terjadinya dikotomi pendidikan merupakan bentuk sistem pendidikan

Indonesia pra kemerdekaan, dua sistem pendidikan memiliki orientasi yang berbeda. Pendidikan sekolah, dengan sistem kelas yang hanya mengajarkan ilmu pengetahuan umum tanpa ada pengetahuan agama, orientasinya adalah memberikan tawaran lapangan pekerjaan pada siswa didik. Sedangkan pesantren sebagai pendidikan Islam tradisional memiliki sistem per-pondok-an, dengan ilmu agama sebagai bahan ajar wajib, pendidikan untuk mendidik menjadi manusia yang beriman tanpa ada orientasi memenuhi pasar lapangan pekerjaan.

Dampak dari pendidikan pra kemerdekaan, cukup mempengaruhi berbagai aspek. Berbagai aspek mulai dari politik, ekonomi, pendidikan dan ideologi mengalami pergeseran. Karakter ideologi Indonesia spiritualisme-religius bergeser menjadi materialisme-kapitalisme, aspek moral juga terpengaruh. Dapat dianggap orang yang bermoral baik, jika dapat berguna dan bermanfaat secara materil, tanpa manfaat dan berguna secara materil sulit untuk dianggap orang baik.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa ada dampak positif dari pendidikan yang diterapkan oleh penjajah. Sistem kelas dengan menggunakan meja, bangku, buku tulis, dan papan tulis. Setidaknya banyak tokoh lahir menjadi penggerak, pelopor pergerakan dan pejuang kemerdekaan yang terlahir dari rahim pendidikan ala kolonialisme.

Terdapat beberapa catatan keberadaan sekolah atau madrasah pra kemerdekaan, diantaranya, 1) Madrasah Adabiyah School didirikan oleh H. Abdullah tahun 1907. Sekolah ini mula-mula berkelas dan memakai bangku, meja dan papan tulis. Sekolah tersebut tidak bertahan lama, dan diganti dengan Madrasah al Iqbal al Islamiyah yang diprakarsai oleh Syekh Taher Jamaluddin dari Singapura. Pada tahun 1914 madrasah Abadiyah dihidupkan kembali yang merupakan HIS pertama di Minangkabau. 2). Madrasah Diniyah School yang didirikan oleh Zainuddin Labai El Yunisi 1915 di Minangkabau dengan menggunakan sistem modern dengan menggunakan alat tulis dan alat peraga". 3). Madrasah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan tahun 1923 di Yogyakarta. 4). Madrasah Sumatra Tawalib, yang didirikan oleh Syekh Abdul Karim Amrullah tahun 1921 di Padang Panjang. 5). Madrasah Sajadah Abadiyah yang didirikan oleh Teuku Beureuh pada tahun 1930 di Sigli (Aceh) (Susmihara, 2013).

Kebijakan kolonialisme Jepang agak lebih lunak pada awalnya dan lebih akomodatif dalam pendidikan, konkretnya madrasah menjadi berkembang pesat. Juga adanya pendidikan Agama di sekolah, termasuk pelajaran budi pekerti di sekolah negeri. Merupakan kebijakan kolonial Jepang yang cukup berdampak baik

untuk perkembangan pendidikan Indonesia secara umum. Kendati demikian, kebijakan tersebut untuk mengambil simpati dan empati masyarakat religius. Tetap pada akhirnya Jepang menerapkan kerja paksa, dan berbagai kebijakan untuk mendukung Jepang dalam perang dunia II melawan musuh. Beberapa gambaran terkait pendidikan pada masa Belanda. Kebijakan belanda cukup diskriminatif dalam hal pendidikan, mendahulukan pengetahuan umum tanpa agama, pendidikan Indonesia dijadikan wahana mencetak tenaga kerja dan kepegawaian saja, tanpa ada upaya untuk me-Indonesia-kan masyarakat Indonesia, sekolah menjadi ladang potensial dalam proses kristenisasi. Gambaran dampak positif kebijakan Belanda, termasuk pembelajaran modern, dengan sistem kelas, meja, bangku, papan tulis.

Diskripsi pendidikan masa penjajahan Jepang, walaupun Jepang menjajah Indonesia tidak lama, bahkan terbilang singkat daripada Belanda. Bahwa, Jepang memperhatikan pendidikan masyarakat Indonesia, walaupun terbilang sebagai siasat belaka. Kebijakan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, cukup menggugah gairah masyarakat Indonesia untuk merdeka. Pelajaran agama dan budi pekerti menjadi pelajaran wajib di sekolah, juga upaya atensi terhadap pendidikan. Walaupun di kemudian hari, menampilkan hakikat kekejaman Jepang, kerja paksa tanpa gaji, melibatkan pelajar untuk komponen dukungan dalam menghadapi Perang Dunia ke-II (Iskandar & Ansori, 2022).

Kondisi Pendidikan pada Masa Penjajahan Jepang

Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia, semuanya diubah oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kepentingan perang. Tidak mengherankan bahwa segala komponen sistem pendidikannya diarahkan untuk kepentingan perang. Adapun ciri-ciri sistem pendidikan Jepang adalah sebagai berikut: (1) Dihapusnya Dualisme Pendidikan. Pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putera, dan sistem pengajaran seperti itu di hilangkan oleh Jepang. Dan hanya satu jenis sekolah rendah yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu: sekolah rakyat selama 6 tahun, yang ketika itu terkenal dengan nama "Kokumin Gakko" atau disebut juga sebagai Sekolah Nippon Indonesia (SNI). Sekolah-sekolah desa masih tetap ada akan tetapi namanya diganti menjadi sekolah pertama. Serta jenjang pengajaran pun berubah menjadi: a. Sekolah rakyat (SR) 6 tahun (termasuk sekolah pertama) b. Sekolah menengah 3 tahun (sekolah menengah pertama) c. Sekolah menengah tinggi 3 tahun (SMT atau SMA-nya pada zaman Jepang). (2) Dirubahnya Tujuan Pendidikan. Tujuan pendidikan adalah untuk

menyediaan tenaga secara cuma-cuma (romusha) dan prajurit- prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diwajibkan latihan fisik, latihan kemiliteran dan diindoktrinasi ketat. Pada akhir zaman Jepang terdapat pertanda tujuan menjepangkan anak-anak Indonesia. (3) Proses Pembelajaran Diganti dengan Kegiatan Yang Tidak Ada Kaitannya dengan Pendidikan (Hasnida, 2017).

Proses pembelajaran disekolah dirubah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di sekolah antara lain: (a). Mengumpulkan batu dan pasir untuk keperluan perang (b) Membersihkan bengkel-bengkel dan asrama militer (c) Menanam umbi-umbian, dan sayur-sayuran lahan sekolah untuk persediaan makanan (d) Menanam pohon jarak untuk pelumas. (4) Pendidikan dilatih agar memiliki semangat perang. Bahkan Seorang pendidik sebelum mengajar diwajibkan terlebih dahulu mengikuti pelatihan untuk didoktrin dengan semboyan mereka yaitu Hakko Ichiu (Delapan Penjuru Dunia Di Bawah Satu Atap). Jepang juga menanamkan Ideologi nya yang diharapkan bisa menghancurkan Ideologi Indonesia merdeka dan menanamkan semangat perang, yang pelaksanaannya dipusatkan di Jakarta selama tiga bulan. Untuk mempermudah dalam menanamkan semangat jepang tersebut, maka diajarkan bahasa jepang dan nyanyian-nyanyian semangat kemiliteran kepada para murid. (5) Pendidikan pada masa jepang sangat mengenaskan. Kondisi pendidikan pada masa pemerintahan jepang bahkan lebih buruk daripada pendidikan pada masa penjajahan belanda. Dapat dilihat dari segi kuantitatif trend nya yang mengalami kemunduran (sekolah, murid, dan guru). (6) Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Meskipun bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa pengantar pada tiap-tiap jenis sekolah, akan tetapi sekolah-sekolah itu dipergunakan juga sebagai alat untuk memperkenalkan budaya jepang kepada rakyat.

Sekian lama Belanda menjajah Indonesisa, giliran Jepang mendarat di Indonesia tepatnya di Jawa, pada tanggal 1 Maret 1942. Jepang mengalahkan Belanda dengan membombandir Bandung sebagai pusat pertahanan, akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jepang dalam masa penjajahan, terbilang lebih kejam daripada Belanda. Semua harta milik rakyat dirampas oleh Jepang untuk kepentingan perang (Abbas, 2018).

Jepang berasumsi bahwa, salah satu jalan untuk menguasai dan me-Nippon-kan Indonesia, adalah pendidikan. Berbagai keputusan-keputusan Jepang memaksa kurikulum dirubah sedemikian rupa, tekanan berupa keputusan dalam pendidikan sangat variatif. Mulai dari mengurangi pembelajaran berteks Arab, mengganti

pelajaran Agama menjadi agama Shinto, mewajibkan menyayikan lagu Kimiyago (lagu kebangsaan), mewajibkan untuk melakukan seikeirei (tradisi untuk memberi hormat dengan membungkukkan badan kepada arah Tenno Neika, Kaesar Jepang) termasuk berkaitan dengan metodologi pengajarannya (Abbas; 2018).

Kebijakan pendidikan Jepang yang mendekonstruksi nilai budaya nusantara dan antetesis dengan norma agama Islam, menyebabkan para Ulama geram. KH. Hasyim Asy'ari, pimpinan pesantren Tebu ireng dan Rais Amm Nahdlatul Ulama melawan atas kebijakan Jepang tersebut, dampak dari perlawanan dan ketidak patuhan KH. Hasyim Asy'ari terhadap kebijakan Jepang, menyebabkan beliau dijebloskan di penjara selama enam bulan. Sejak awal, sejak tahun 1913 pesantrennya dibakar oleh belanda, sebagai imbas pembangkangan kebijakan tersebut.

Pendidikan menjadi cukup terbengkalai pada masa itu, terlepas kebijakan demikian, pendidikan madarasah daalam pesantren luput dari pengawasan Jepang. Setidaknya pendidikan berjalan dengan seharusnya. Kendati dianggap lebih kejam sebagai penjajahan, Jepang memberikan atensi besar dalam hal pendidikan, hal tersebut terbukti dari beberapa kebijakan, diantaranya (Abbas; 2018): a. Legalitas atas pendirian Sekolah Tinggi Islam di Jakarta oleh KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir dan Bung Hatta. b. Bantuan dan kunjungan Jepang pada pesantren, madrasah dan sekolah. Perhatian berupa bantuan dana untuk pembenahan kurikulum merupakan cukup intensif dilakukan Jepang. c. Penetapan pelajaran budi pekerti di berbagai sekolah negeri. d. Penyediaan kursus sekolah dan pelatihan bagi calon-calon guru, beberapa tahapan sekolah bagi calon guru, diantaranya. Pertama, Sekolah Guru (SG) yang dinamakan Sjootoo Sihan Gakko, dilakukan selama 2 tahun. Kedua, Sekolah Guru Menengah (SGM) dinamakan Cutto Sihan Gakko, dan dilakukan selama 4 tahun. Ketiga, Sekolah Guru Tinggi (SGT) dinamakan Kootoo Sihan Gakko, dilakukan selama 6 tahun. e. Sistem jenjang pendidikan yang cukup sistematis, diantaranya. Pertama, Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko/Sekolah Rakyat) kurun waktu lama studi adalah 6 tahun. SR ini merupakan hasil konversi sekolah dasar 3 atau 5 tahun pada masa Hindia Belanda. Kedua, Pendidikan Lanjutan, terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) lama studi juga 3 tahun. Ketiga, Pendidikan Kejuruan, mencakup sekolah lanjutan vokasional, antara lain bidang pertanian, pertukangan, pelayaran dan pendidikan teknik. f. Penyatuan dualisme kurikulum, dualistik yang dimaksud adalah pengajaran barat dan pengajaran bumi putera. Dengan dihapusnya dualisme pengajaran disatukan dalam satu jenjang yaitu Sekolah Rakyat (SR). g. Terdapat pengajaran bahasa Indonesia sebagai pelajaran

wajib di setiap jenjang. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dan bahasa resmi sekolah, hanya saja baru kemudian, bahasa Jepang dan tradisi orang Jepang harus dipelajari dan dimasukkan dalam kurikulum. h. Termasuk bagian dari belajar mengajar pada era Jepang, peserta didik diharuskan membuat rabuk kompos, kerja bakti bersama-sama, dan kegiatan yang mendukung kelangsungan peperangan Jepang beserta sekutu. Hal demikian harus dilakukan untuk menanamkan rasa ke-Jepang-an pada peserta didik.

Pendidikan Islam masa penjajahan Jepang semakin bergairah. Dengan dukungan pemerintah Jepang, madrasah dan sekolah yang pernah ditutup oleh pemerintah Belanda dibuka kembali. Perhatian pemerintahan Jepang terhadap pendidikan Islam, termasuk upaya untuk mendapatkan hati umat Islam. Pada hakikatnya kebijakan demikian, termasuk siasat Jepang. Saat Perang Dunia II meletus, perhatian tersebut berubah menjadi tindakan beringas dari pemerintahan Jepang, berbagai kerja paksa diterapkan, dan memaksa rakyat Indonesia terlibat dalam badan pertahanan Jepang dalam peperangan. Jepang terlihat lebih kejam daripada Belanda menjajah Indonesia (Susmihara; 2013).

4. SIMPULAN

Dalam catatan historis, sejarah pendidikan Islam dimulai seiring dengan awal berkembangnya sejarah Islam, yaitu sejak masa Rasulullah Saw. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, pendidikan Islam juga mengalami berbagai macam dinamika fluktuatif seiring dengan fluktuasi sejarah Islam sendiri. Begitu pula dengan sejarah pendidikan di Indonesia, sangat erat kaitannya dengan kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. Munculnya berbagai macam lembaga pendidikan secara bertahap menjadi tanda perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari yang sangat sederhana, sampai dengan tahap-tahap yang sudah ternilai modern dan lengkap. Surau bagi masyarakat Minangkabau mempunyai banyak fungsi. Tidak hanya sebagai tempat untuk berkumpul, rapat, ataupun tempat istirahat saja, surau juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam.

Bahkan banyak ulama-ulama besar yang disegani terlahir dari surau. Mueunasah merupakan lembaga pendidikan tingkat rendah yang ada di Aceh, dan fungsinya hampir sama dengan surau di Minangkabau. Sebagai lembaga pendidikan Islam tingkat rendah, materi pembelajaran yang diberikan pun masih seputar pengantar dan pengetahuan tentang cara membaca al-Qur'an, kemudian diberikan materi-materi tambahan lainnya.

REFERENSI

- Abbas, A. (2018). *Pendidikan di Indonesia pada Masa Jepang*. Dalam Ash-Shahaba: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 4(1), 62-75.
- Arifuddin, A., & Arrosyid, S. R. (2017). Pengaruh Metode Demontrasi dengan Alat Peraga Jembatan Garis Bilangan Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Bilangan Bulat. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 4(2), 165-178.
- Harkantiningasih, Naniek. "Ceramics Along The Spice Trade Route in the Indonesian Archipelago in the 16th-19th century" dalam Jurnal Forum Arkeologi, Vol. 26, No. 1. 2013.
- Harkantiningasih, Naniek. "Pengaruh Kolonial Di Nusantara" Kalpataru: Majalah Arkeologi. Vol. 23, No. 1, 2014.
- Hasnida, H. (2017). *Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Pra Kolonialisme Dan Masa Kolonialisme (Belanda, Jepang, Sekutu)*. Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(2), 237-256. Diambil dari <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6442>
- Iskandar, K., & Ansori, A. S. (2022). *Pendidikan Islam Masa Pra Kemerdekaan ; Telaah Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan*, 2(2).
- Nizar, Hayati. "Analisis Historis Pendidikan Demokrasi di Minangkabau" dalam Majalah Hadharah PPS IAIN Imam Bonjol Bapang, Vol. 3, 2006.
- Prahani, B.K., Limatahu, I., Winata, S.W., Yuanita, L., & Nur, M. (2016). Effectiveness of physics learning material through guided inquiry models to improve student's problem-solving skills based on multiple representations. *International Journal of Education and Research*, 4(12), 231-244.
- Susmihara. "Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda Dan Jepang" dalam Jurnal Rihlah, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Syarif, M. (2019). *Politik Etis pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan pengaruhnya terhadap pesantren*. Inovatif, 5(1), 109-131.
- Wulan Juliani Sukmana. (2021). (Pdf) *Metode Penelitian Sejarah*. Seri Publikasi Pembelajaran, Vol 1 No 2 (April). Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/351097486_METODE_PENELITIAN_SEJARA